Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 1449-1459
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Pengaruh PSAP, SIA, dan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi sebagai Moderasi

Fadlilah Rosyidasari, Neva Novianti
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta
fadilarosyidasari@gmail.com, nevanovianti@bunghatta.ac.id

Abstrak

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak selalu menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah bebas dari kelemahan, terutama pada aspek pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data primer dari kuesioner yang dibagikan langsung kepada 94 responden pada 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Agam yang dipilih dengan purposive sampling. Data dianalisis dengan Partial Least Squares menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAP (β = 0,300; p = 0,002) dan SIA (β = 0,277; p = 0,021) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan SPI berpengaruh positif tetapi tidak signifikan (β = 0,089; p = 0,559). Komitmen organisasi tidak terbukti memoderasi pengaruh PSAP, SIA, maupun SPI terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai R-square sebesar 0,409 dan adjusted R-square sebesar 0,361 menunjukkan bahwa model menjelaskan sebagian variasi kualitas laporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbaikan kualitas laporan keuangan daerah lebih bergantung pada kepatuhan terhadap standar akuntansi, dukungan sistem informasi yang andal, dan pelaksanaan pengendalian internal yang substantif daripada sekadar peningkatan komitmen pegawai. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pelatihan standar akuntansi dan penguatan sistem informasi.

Kata kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan, Komitmen Organisasi

Abstract

An Unqualified Opinion (WTP) does not necessarily indicate that local government financial management is free from weaknesses, particularly in internal control and regulatory compliance. This study aims to examine the effect of the implementation of Government Accounting Standards (PSAP), Accounting Information Systems (AIS), and Internal Control Systems (ICS) on the quality of local government financial reports, with organizational commitment as a moderating variable. This quantitative study used primary data collected through questionnaires distributed directly to 94 respondents in 28 Regional Apparatus Organizations (OPD) in Agam Regency, selected by purposive sampling. The data were analyzed using Partial Least Squares with SmartPLS. The results show that PSAP (β = 0.300; p = 0.002) and AIS (β = 0.277; p = 0.021) have a positive and significant effect on financial report quality, whereas ICS has a positive but insignificant effect (β = 0.089; p = 0.559). Organizational commitment does not moderate the effect of PSAP, AIS, or ICS on financial report quality. The R-square of 0.409 and adjusted R-square of 0.361 indicate that the model explains part of the variation in financial report quality. These findings suggest that improving the quality of local government financial reports depends more on compliance with accounting standards, reliable information systems, and substantive internal control than on increasing employee commitment alone. Local governments should therefore prioritize accounting standards training and the strengthening of information systems.

Keywords: Implementation Government Accounting Standards, Accounting Information Systems, Internal Control Systems, Financial Report Quality, Organizational Commitment

1. Pendahuluan

Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus terwujud dalam informasi akuntansi agar tujuan penyajian laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, dapat tercapai (Sari & Widiatmoko, 2023). Informasi di dalamnya menjadi dasar penetapan kebijakan strategis oleh pemerintah maupun pihak eksternal (Bestari & Wahyuni, 2023). Sejak

otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah wajib menyajikan pengelolaan keuangannya secara transparan kepada publik melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Laporan tersebut dinilai berkualitas apabila relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai kualitas penyajian LKPD melalui opini audit. Dari 542 LKPD tahun anggaran 2022 yang diperiksa, 496 pemerintah daerah (sekitar 91 persen) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan 41 memperoleh Wajar Dengan Pengecualian dan lima Tidak Menyatakan Pendapat (BPK RI, 2023). Pada 546 LKPD tahun anggaran 2023, sebanyak 493 pemerintah daerah memperoleh opini WTP, 48 Wajar Dengan Pengecualian, tiga Tidak Menyatakan Pendapat, dan dua Tidak Wajar (BPK RI, 2024). Namun, opini WTP tidak selalu berarti pengelolaan keuangan bebas dari masalah. Pemeriksaan atas LKPD 2022 masih menemukan ketidaksesuaian kas pada bendahara pengeluaran, aset tetap yang tidak dapat ditelusuri, realisasi belanja barang dan jasa yang tidak memenuhi ketentuan, serta kelebihan pembayaran yang belum disetorkan ke kas daerah (BPK RI, 2023).

Fenomena serupa tampak di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh opini WTP secara berturut-turut sejak 2012 (BPK Sumbar, 2024), dan jumlah kabupaten/kota berpredikat WTP meningkat dari enam daerah pada 2012 menjadi 19 daerah (95 persen) pada 2021. Meski demikian, sebagian besar kabupaten/kota masih memiliki kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan akibat lemahnya pengawasan, belum tuntasnya tindak lanjut rekomendasi, dan terbatasnya kapasitas aparatur (BPK Sumbar, 2022). Kabupaten Agam memperlihatkan paradoks yang jelas. Daerah ini meraih opini WTP sembilan kali berturut-turut, tetapi pemeriksaan masih mengungkap penatausahaan kas dan aset tetap yang belum tertib, kelebihan pembayaran belanja honorarium, belanja bahan bakar minyak yang tidak didukung bukti sah, serta pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi sebenarnya (Metro, 2023). Dugaan korupsi pada proyek wisata Sajuta Janjang dengan kerugian negara Rp553 juta (Redaksi, 2023) menegaskan adanya kelemahan pengawasan dan kepatuhan yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penelitian terdahulu telah mengkaji determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi hasilnya belum konsisten. Penerapan PSAP dilaporkan berpengaruh positif (Warliana et al., 2023; Gomes et al., 2023; Nurliani et al., 2025), sedangkan Sabo et al. (2024) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dilaporkan berpengaruh positif oleh Ashari et al. (2025), sementara Atharrizka et al. (2021) dan Attiogbe et al. (2025) tidak menemukan pengaruh signifikan. Hasil mengenai SPI lebih beragam, yaitu positif (Aziyah & Yanto, 2022; Ntahondereye et al., 2024), tidak signifikan (Sunardi et al., 2021), bahkan negatif pada kondisi tertentu (Ramadhan et al., 2022; Lustrilanang et al., 2023). Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa efektivitas standar, sistem, dan pengendalian bergantung pada faktor lain, salah satunya sikap dan keterikatan aparatur terhadap organisasi atau komitmen organisasi.

Komitmen organisasi telah digunakan sebagai variabel moderasi, tetapi cakupannya masih terbatas. Luthfya et al. (2024) menguji PSAP, SPI, dan pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan komitmen organisasi sebagai moderasi, sedangkan Nulandary & Puspita (2025) menguji SIA dan SPI tanpa memasukkan PSAP. Sepanjang penelusuran penulis, PSAP, SIA, dan SPI belum diuji secara simultan dalam satu model moderasi pada konteks pemerintah daerah di Indonesia, dan komitmen organisasi belum diuji sebagai moderator bagi ketiganya sekaligus. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan ketiga variabel independen dalam satu model, penggunaan komitmen organisasi sebagai moderator bagi ketiganya, serta pemilihan Kabupaten Agam yang memperlihatkan paradoks antara capaian opini WTP dan kelemahan pengelolaan keuangan.

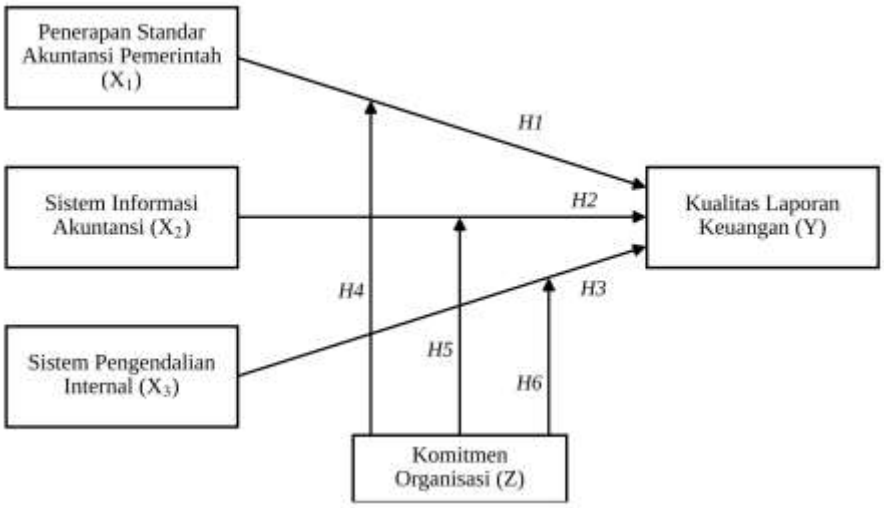
Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh PSAP, SIA, dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta peran komitmen organisasi dalam memoderasi ketiga hubungan tersebut pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Agam. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akuntansi sektor publik dengan memadukan faktor teknis berupa standar, sistem, dan pengendalian dengan faktor perilaku berupa komitmen, serta memberi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14751
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

1.1. Teori Keagenan dan Kerangka Konseptual

Penelitian ini berlandaskan teori keagenan (*agency theory*) yang memandang hubungan keagenan sebagai kontrak ketika satu pihak (prinsipal) mendelegasikan sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada pihak lain (agen) (Jensen & Meckling, 1976). Pada pemerintahan, masyarakat berperan sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen yang mengelola anggaran. Karena agen memiliki informasi lebih banyak daripada prinsipal, muncul asimetri informasi dan potensi perilaku oportunistik, sehingga prinsipal memerlukan mekanisme pelaporan dan pengawasan yang efektif (Mardiasmo, 2018).

Dalam kerangka ini, laporan keuangan menjadi sarana utama akuntabilitas agen. Penerapan standar akuntansi yang konsisten dan pengendalian internal yang efektif diharapkan menekan peluang manipulasi informasi, sistem informasi akuntansi yang andal mempercepat dan memperjelas aliran informasi dari agen kepada prinsipal, sedangkan komitmen organisasi mendorong aparatur bertindak selaras dengan kepentingan organisasi. Hubungan antarvariabel tersebut dirangkum pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

1.2. Pengembangan Hipotesis

PSAP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi acuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Sidabalok et al., 2026). Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sehingga setiap unsur pelaporan memiliki landasan yang jelas (Warliana et al., 2023). Semakin tinggi pemahaman dan kepatuhan pegawai terhadap PSAP, semakin sesuai pencatatan dan pelaporan dengan ketentuan, dan pelaksanaan SAP akrual menuntut kemampuan akuntansi aparatur yang lebih baik melalui pelatihan dan sosialisasi (Djumiyati et al., 2024). Hasil penelitian terdahulu umumnya mendukung pengaruh positif PSAP terhadap kualitas laporan keuangan (Warliana et al., 2023; Gomes et al., 2023; Luthfya et al., 2024; Nulandary & Puspita, 2025; Nurliani et al., 2025), meskipun Sabo et al. (2024) tidak menemukan pengaruh signifikan. Hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

H_1: PSAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

SIA adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data keuangan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan, dengan komponen berupa prosedur, data, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian (Romney & Steinbart, 2018). Sistem yang andal menghubungkan proses mulai dari pencatatan transaksi hingga penyajian laporan secara sistematis, akurat, dan tepat waktu sehingga menurunkan risiko kesalahan manusia. Pengaruh positif SIA terhadap kualitas laporan keuangan dilaporkan oleh Ashari et al. (2025) dan Nulandary & Puspita (2025), tetapi tidak ditemukan oleh Atharrizka et al. (2021) dan Attiogbe et al. (2025). Hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14751
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

H_2: SIA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, SPI adalah proses terpadu yang berlangsung terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). SPI yang efektif, yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, berfungsi sebagai garis pertahanan awal terhadap kesalahan penyajian (Aziyah & Yanto, 2022). Pengaruh positif SPI dilaporkan oleh Aziyah & Yanto (2022), Luthfya et al. (2024), dan Ntahondereye et al. (2024), tetapi Sunardi et al. (2021) tidak menemukan pengaruh signifikan, sedangkan Ramadhan et al. (2022) dan Lustrilanang et al. (2023) melaporkan pengaruh negatif pada kondisi tertentu. Hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut.

H_3: SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Komitmen organisasi adalah dorongan pegawai untuk bekerja sungguh-sungguh bagi kepentingan instansi, bertahan di dalamnya, dan menganut nilai serta tujuan organisasi (Rostini & Nasir, 2024), yang mencakup komitmen afektif, normatif, dan kontinuan (Luthfya et al., 2024). Pegawai yang berkomitmen tinggi cenderung lebih patuh pada prosedur dan lebih konsisten menjalankan sistem sehingga berpotensi memperkuat pengaruh standar, sistem, dan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan (Pradnyandari & Putra, 2022; Asri & Jaeni, 2023). Pada PSAP, komitmen mendorong pegawai menginvestasikan waktu dan upaya untuk memahami standar. Pada SIA, komitmen mendorong penggunaan sistem secara bertanggung jawab dan penginputan data yang akurat. Pada SPI, komitmen membuat pegawai memandang pengendalian sebagai alat menjaga integritas laporan dan bukan sebagai beban administratif (Aziyah & Yanto, 2022).

Bukti empiris mengenai peran moderasi ini belum seragam. Luthfya et al. (2024) melaporkan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh PSAP, Alpi & Akbar (2024) serta Sari & Widiatmoko (2023) melaporkan penguatan pada pengaruh SPI, sedangkan Nulandary & Puspita (2025) memperoleh hasil yang tidak mendukung peran moderasi yang kuat. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat sampai keenam dirumuskan sebagai berikut.

H_4: Komitmen organisasi memoderasi pengaruh PSAP terhadap kualitas laporan keuangan.

H_5: Komitmen organisasi memoderasi pengaruh SIA terhadap kualitas laporan keuangan.

H_6: Komitmen organisasi memoderasi pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Metode Penelitian

2.1. Desain, Populasi, dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei dan data primer. Populasi penelitian adalah 28 OPD di Kabupaten Agam yang terdiri atas dua sekretariat, satu inspektorat, 19 dinas, dan enam badan (Kab. Agam, 2026). Responden dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2025).

Kriteria responden adalah aparatur sipil negara yang terlibat dalam pelaporan keuangan OPD, yaitu kepala bagian/subbagian keuangan, bendahara, dan staf keuangan yang menjalankan fungsi akuntansi atau administrasi keuangan sesuai struktur organisasi dan tata kerja masing-masing OPD. Jumlah responden yang berhasil dihimpun adalah 94 orang. Responden terbanyak berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perhubungan, masing-masing tujuh orang.

2.2. Pengumpulan Data dan Pengukuran Variabel

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan dan dipantau langsung oleh peneliti di setiap OPD untuk meningkatkan tingkat pengembalian. Seluruh 94 kuesioner yang dibagikan kembali dalam keadaan lengkap (tingkat pengembalian 100 persen). Semua item diukur dengan skala Likert lima poin, dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5).

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14751
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Instrumen diadaptasi dari penelitian terdahulu sebagaimana dirangkum pada Tabel 1. Kualitas laporan keuangan didefinisikan sebagai tingkat terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penerapan PSAP didefinisikan sebagai tingkat implementasi standar akuntansi pemerintahan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 oleh OPD dalam menyusun laporan keuangan. SIA adalah subsistem organisasi yang menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan, SPI adalah proses pengendalian berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, dan komitmen organisasi adalah dorongan pegawai untuk bekerja demi kepentingan instansi serta bertahan di dalamnya.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Item	Sumber instrumen
Kualitas laporan keuangan (Y)	Relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami	14	Waoma et al. (2024)
Penerapan PSAP (X1)	Basis akrual, pencatatan pendapatan dan kewajiban, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, persediaan, aset tetap, koreksi kesalahan, laporan keuangan konsolidasi, laporan operasional	10	Luthfya et al. (2024)
SIA (X2)	Keandalan sistem, integrasi, fleksibilitas, waktu respons	4	Azmi & Rahmi (2025)
SPI (X3)	Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan	11	Silalahi et al. (2025)
Komitmen organisasi (Z)	Komitmen afektif, normatif, dan kontinuan	8	Luthfya et al. (2024)

Sumber: Data diolah penulis (2026).

2.3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan *Partial Least Squares* (PLS) menggunakan SmartPLS karena metode ini tidak mensyaratkan distribusi normal multivariat dan dapat digunakan pada ukuran sampel yang relatif kecil (Ghozali, 2021; Hair et al., 2019). Analisis dilakukan dalam dua tahap, yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural.

Evaluasi model pengukuran meliputi validitas konvergen, reliabilitas konstruk, dan validitas diskriminan. Indikator dinyatakan valid apabila *outer loading* bernilai minimal 0,70, dan indikator yang tidak memenuhi kriteria dikeluarkan lalu model diestimasi ulang. Reliabilitas konstruk dinilai dengan *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang masing-masing harus lebih dari 0,70, serta *average variance extracted* (AVE) yang harus lebih dari 0,50. Validitas diskriminan diuji dengan kriteria Fornell-Larcker, yaitu akar kuadrat AVE suatu konstruk harus lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lain, dan dengan *cross loading* (Ghozali, 2021).

Evaluasi model struktural menggunakan koefisien determinasi (R^2) dengan ambang 0,75, 0,50, dan 0,25 yang masing-masing menunjukkan model kuat, sedang, dan lemah (Ghozali, 2021). Signifikansi koefisien jalur diuji melalui prosedur *bootstrapping*, dan hipotesis diterima apabila nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 pada tingkat signifikansi 5 persen. Peran moderasi diuji dengan memasukkan suku interaksi antara komitmen organisasi dan masing-masing variabel independen, sebagaimana ditunjukkan pada rumus 1.

$$\mathrm{KLK} = \beta_0 + \beta_1 \mathrm{PSAP} + \beta_2 \mathrm{SIA} + \beta_3 \mathrm{SPI} + \beta_4 \mathrm{KO} + \beta_5 (\mathrm{PSAP} \times \mathrm{KO}) + \beta_6 (\mathrm{SIA} \times \mathrm{KO}) + \beta_7 (\mathrm{SPI} \times \mathrm{KO}) + \varepsilon \quad (1)$$

dengan KLK adalah kualitas laporan keuangan, PSAP adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, SIA adalah sistem informasi akuntansi, SPI adalah sistem pengendalian internal, dan KO adalah komitmen organisasi. Koefisien β_1 sampai β_3 menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen, β_4 adalah koefisien komitmen organisasi sebagai prediktor, β_5 sampai β_7 menunjukkan peran moderasi komitmen organisasi, β_0 adalah konstanta, dan ε adalah galat.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14751
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Karakteristik Responden dan Statistik Deskriptif

Seluruh 94 kuesioner yang dibagikan kembali dalam kondisi lengkap sehingga dapat dianalisis. Tabel 2 menunjukkan bahwa responden didominasi perempuan (68,1%), berpendidikan S-1/D-4 (56,4%), dan berlatar belakang non-akuntansi (73,4%). Sebagian besar responden menjabat bendahara pengeluaran atau staf (66,0%), memiliki pengalaman kerja kurang dari lima tahun (41,5%), dan 54,3% belum pernah mengikuti kursus atau diklat akuntansi pengelolaan keuangan daerah. Satu responden pada kategori jenis kelamin dan dua responden pada kategori jurusan memiliki kode jawaban yang tidak valid.

Tabel 2. Karakteristik Responden (N = 94)

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Jenis kelamin		
Laki-laki	29	30,9
Perempuan	64	68,1
Kode tidak valid	1	1,1
Usia		
<25 tahun	5	5,3
25–30 tahun	26	27,7
31–35 tahun	20	21,3
36–40 tahun	17	18,1
>40 tahun	26	27,7
Pendidikan		
SMA/SMK	10	10,6
D-3	24	25,5
S-1/D-4	53	56,4
S-2	7	7,4
Jurusan pendidikan		
Akuntansi	23	24,5
Non-akuntansi	69	73,4
Kode tidak valid	2	2,1
Lama bekerja		
<5 tahun	39	41,5
6–10 tahun	17	18,1
11–15 tahun	9	9,6
16–20 tahun	8	8,5
21–25 tahun	13	13,8
>25 tahun	8	8,5
Jabatan		
Kepala SKPD	3	3,2
PPK-SKPD	29	30,9
Bendahara pengeluaran/staf	62	66,0
Kursus/diklat akuntansi keuangan daerah		
Tidak pernah	51	54,3
1–2 kali	31	33,0
3–5 kali	10	10,6
6–10 kali	2	2,1

Sumber: Data primer diolah (2026).

Para pegawai menyampaikan saat pengisian kuesioner bahwa banyak di antara mereka bekerja tidak sesuai dengan latar belakang keahliannya dan menjalankan tugas berdasarkan arahan senior serta belajar secara otodidak. Kondisi ini penting untuk menafsirkan hasil penelitian pada bagian pembahasan.

Statistik deskriptif pada Tabel 3 dihitung dari jumlah skor seluruh item awal sehingga nilai maksimum teoretis berbeda antarvariabel. Rata-rata skor setiap variabel berada pada kisaran 84 sampai 88 persen dari skor maksimum, yaitu 86,6% untuk PSAP, 84,2% untuk SIA, 83,8% untuk SPI, 87,7% untuk kualitas laporan keuangan, dan 84,1% untuk komitmen organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap penerapan standar, sistem, pengendalian, komitmen, dan kualitas laporan keuangan cenderung tinggi.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14751
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (N = 94)

Variabel	Item	Min	Maks	Rata-rata	Simpangan baku
Penerapan standar akuntansi pemerintah	10	33	50	43,29	4,136
Sistem informasi akuntansi	4	12	20	16,84	2,156
Sistem pengendalian internal	11	35	55	46,10	4,661
Kualitas laporan keuangan	14	33	70	61,37	5,962
Komitmen organisasi	8	23	40	33,64	3,895

Sumber: Hasil pengolahan SmartPLS (2026).

3.2. Model Pengukuran

Dari 47 item awal, 17 item dikeluarkan karena *outer loading* di bawah 0,70, yaitu empat item PSAP, lima item SPI, lima item kualitas laporan keuangan, dan tiga item komitmen organisasi, sedangkan seluruh item SIA dipertahankan. Setelah estimasi ulang, 30 item yang tersisa memiliki *outer loading* antara 0,704 dan 0,895 sehingga memenuhi syarat validitas konvergen (Tabel 4).

Seluruh konstruk juga reliabel. Nilai *Cronbach's alpha* berkisar antara 0,807 dan 0,913, *composite reliability* antara 0,865 dan 0,928, serta AVE antara 0,561 dan 0,727, sehingga semuanya melampaui batas minimum yang disyaratkan.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Konvergen dan Reliabilitas Konstruk

Konstruk	Item awal/akhir	Rentang *outer loading*	*Cronbach's alpha*	*Composite reliability*	AVE
Penerapan PSAP	10/6	0,704–0,856	0,862	0,897	0,593
SIA	4/4	0,749–0,895	0,873	0,914	0,727
SPI	11/6	0,713–0,806	0,863	0,895	0,588
Kualitas laporan keuangan	14/9	0,717–0,823	0,913	0,928	0,589
Komitmen organisasi	8/5	0,712–0,793	0,807	0,865	0,561
Batas minimum		≥ 0,70	> 0,70	> 0,70	> 0,50

Sumber: Hasil pengolahan SmartPLS (2026).

Validitas diskriminan terpenuhi. Pada Tabel 5, akar kuadrat AVE setiap konstruk (nilai diagonal, 0,749–0,852) lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lain (0,269–0,510). Analisis *cross loading* juga menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki *loading* tertinggi pada konstruk yang diukurnya. Dengan demikian, model pengukuran layak digunakan untuk pengujian struktural.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Diskriminan (Kriteria Fornell-Larcker)

Konstruk	KLK	KO	PSAP	SIA	SPI
Kualitas laporan keuangan (KLK)	0,767				
Komitmen organisasi (KO)	0,384	0,749			
Penerapan PSAP	0,510	0,269	0,770		
Sistem informasi akuntansi (SIA)	0,483	0,319	0,380	0,852	
Sistem pengendalian internal (SPI)	0,410	0,407	0,400	0,345	0,767

Sumber: Hasil pengolahan SmartPLS (2026). Nilai diagonal adalah akar kuadrat AVE.

3.3. Model Struktural dan Pengujian Hipotesis

Nilai R^2 kualitas laporan keuangan sebesar 0,409 dan *adjusted* R^2 sebesar 0,361. Artinya, PSAP, SIA, SPI, komitmen organisasi, dan suku interaksinya menjelaskan 40,9% variasi kualitas laporan keuangan (36,1% setelah penyesuaian), sedangkan 59,1% sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Nilai tersebut berada di atas ambang 0,25 tetapi di bawah 0,50 sehingga kemampuan jelas model tergolong lemah hingga sedang.

Hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 2. PSAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (koefisien 0,300; t = 3,065; p = 0,002), demikian pula SIA (koefisien 0,277; t = 2,314; p = 0,021), sehingga H_1 dan H_2 diterima. SPI berpengaruh positif tetapi tidak signifikan (koefisien 0,089; t = 0,584; p = 0,559) sehingga H_3 ditolak. Ketiga suku interaksi tidak signifikan, yaitu PSAP×KO

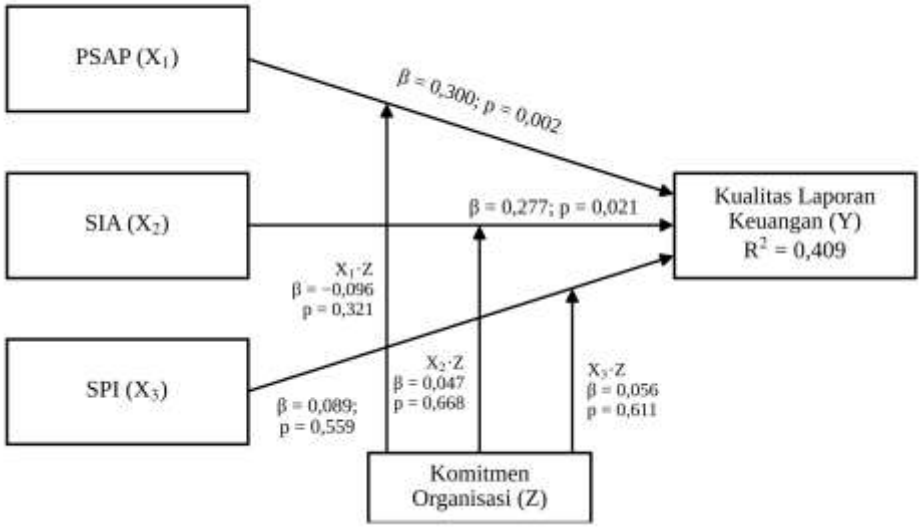
DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14751
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

(koefisien −0,096; t = 0,993; p = 0,321), SIA×KO (koefisien 0,047; t = 0,429; p = 0,668), dan SPI×KO (koefisien 0,056; t = 0,509; p = 0,611), sehingga H_4, H_5, dan H_6 ditolak.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Jalur	Koefisien (O)	Rata-rata sampel (M)	STDEV	t-statistik	p-value	Hasil
H_1	PSAP → KLK	0,300	0,308	0,098	3,065	0,002	Diterima
H_2	SIA → KLK	0,277	0,270	0,120	2,314	0,021	Diterima
H_3	SPI → KLK	0,089	0,116	0,152	0,584	0,559	Ditolak
H_4	KO × PSAP → KLK	−0,096	−0,076	0,096	0,993	0,321	Ditolak
H_5	KO × SIA → KLK	0,047	0,045	0,111	0,429	0,668	Ditolak
H_6	KO × SPI → KLK	0,056	0,040	0,109	0,509	0,611	Ditolak

Sumber: Hasil pengolahan SmartPLS (2026). KLK = kualitas laporan keuangan; KO = komitmen organisasi.



Gambar 2. Koefisien Jalur dan Nilai Signifikansi Hasil Estimasi Model Struktural

3.4. Pengaruh PSAP, SIA, dan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan

PSAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin konsisten OPD di Kabupaten Agam menerapkan PSAP, antara lain dalam penyusunan laporan arus kas, pengakuan persediaan, klasifikasi aset tetap, pencatatan kewajiban, koreksi kesalahan, dan penyusunan laporan operasional, semakin baik keandalan, relevansi, keterbandingan, dan keterpahaman laporan keuangan yang dihasilkan. Temuan ini sejalan dengan Warliana et al. (2023), Gomes et al. (2023), Luthfya et al. (2024), dan Nulandary & Puspita (2025). Dari sudut pandang teori keagenan, standar yang seragam mempersempit ruang agen untuk menyajikan informasi secara oportunistik sehingga akuntabilitas kepada prinsipal meningkat (Mardiasmo, 2018). Hasil ini berbeda dengan Sabo et al. (2024) yang tidak menemukan pengaruh signifikan, dan perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan karakteristik objek, pemahaman aparatur terhadap standar, serta keselarasan pelatihan di setiap entitas (Djumiyati et al., 2024).

SIA juga berpengaruh positif dan signifikan. Semakin andal, terintegrasi, fleksibel, dan cepat respons aplikasi akuntansi yang digunakan OPD, semakin baik kualitas laporan keuangan. Sistem yang andal mengolah data keuangan dalam jumlah besar dengan ketepatan tinggi sehingga mengurangi kesalahan pencatatan oleh manusia dan mempercepat aliran informasi dari agen kepada prinsipal. Temuan ini sejalan dengan Ashari et al. (2025) dan Nulandary & Puspita (2025), tetapi berbeda dengan Atharrizka et al. (2021) dan Attiogbe et al. (2025). Perbedaan itu dapat disebabkan oleh tingkat integrasi sistem antarunit dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi pada entitas yang diteliti.

SPI berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sehingga keberadaan SPI di OPD Kabupaten Agam belum cukup kuat untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan. Karakteristik responden membantu menjelaskan hasil ini.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14751
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Sebanyak 66,0% responden adalah bendahara pengeluaran atau staf pelaksana yang menjalankan prosedur yang telah ditetapkan dan bukan pihak yang merancang atau menilai sistem pengendalian, 73,4% berlatar belakang non-akuntansi, dan 54,3% belum pernah mengikuti diklat. Dalam kondisi demikian, unsur SPI seperti penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan cenderung dijalankan secara administratif untuk memenuhi kelengkapan dokumen dan belum menjadi upaya substantif menjamin keandalan laporan. Penjelasan ini konsisten dengan temuan BPK mengenai kelemahan SPI pada kabupaten/kota di Sumatera Barat serta temuan penatausahaan kas dan aset tetap di Kabupaten Agam (BPK Sumbar, 2022; Metro, 2023).

Hasil ini sejalan dengan Sunardi et al. (2021) yang tidak menemukan pengaruh signifikan SPI, tetapi berbeda dengan Aziyah & Yanto (2022), Luthfya et al. (2024), dan Ntahondereye et al. (2024) yang melaporkan pengaruh positif signifikan, serta dengan Ramadhan et al. (2022) dan Lustrilanang et al. (2023) yang melaporkan pengaruh negatif. Keragaman hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas SPI sangat bergantung pada konteks dan karakteristik entitas pemerintah yang diteliti. Dengan demikian, keberadaan SPI secara formal tidak otomatis menjamin efektivitas pengawasan sebagai penekan perilaku oportunistik agen.

3.5. Peran Moderasi Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi tidak terbukti memoderasi pengaruh PSAP, SIA, maupun SPI terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien interaksinya sangat kecil dan tidak signifikan (nilai mutlak koefisien paling besar 0,096; p-value paling kecil 0,321), sehingga pengaruh ketiga variabel independen tidak berubah menurut tinggi-rendahnya komitmen pegawai. Hasil ini berbeda dengan Luthfya et al. (2024), Alpi & Akbar (2024), dan Sari & Widiatmoko (2023) yang melaporkan peran penguatan oleh komitmen organisasi, tetapi sejalan dengan hasil yang tidak mendukung peran moderasi tersebut (Nulandary & Puspita, 2025).

Penjelasan yang masuk akal adalah bahwa ketiga variabel independen bersifat teknis dan struktural. PSAP diatur seragam oleh regulasi dan dijalankan menurut pedoman yang sama di seluruh OPD, aplikasi akuntansi beserta infrastrukturnya ditentukan secara terpusat oleh pemerintah daerah, dan efektivitas SPI ditentukan oleh kejelasan pembagian tugas, pengawasan berjenjang, dan konsistensi prosedur yang ditetapkan pimpinan OPD. Karena sebagian besar responden adalah pelaksana yang bekerja berdasarkan pedoman, keterikatan emosional pegawai terhadap organisasi tidak banyak mengubah cara standar, sistem, dan pengendalian dijalankan. Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan lebih ditentukan oleh kompetensi teknis, kemampuan sistem, dan rancangan prosedur daripada oleh komitmen afektif.

Koefisien interaksi PSAP bernilai negatif (−0,096) tetapi tidak signifikan, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai pelemahan pengaruh PSAP oleh komitmen yang tinggi dan hanya menegaskan tidak adanya bukti moderasi. Temuan ini menambah bukti bahwa peran komitmen organisasi sebagai moderator bersifat kontekstual. Bagi pemerintah daerah, hasil ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan perlu menekankan pelatihan teknis, penguatan sistem, dan pengendalian yang substantif, dan tidak cukup bertumpu pada pembinaan komitmen pegawai.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Agam, sedangkan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Komitmen organisasi tidak terbukti memoderasi pengaruh ketiga variabel tersebut. Model menjelaskan 40,9% variasi kualitas laporan keuangan (36,1% setelah penyesuaian), dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Secara teoretis, temuan ini mendukung teori keagenan bahwa standar akuntansi dan sistem informasi yang andal berfungsi menekan asimetri informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sedangkan keberadaan formal sistem pengendalian internal tidak otomatis menjamin efektivitas pengawasan. Secara praktis, pemerintah daerah dan OPD perlu menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi standar akuntansi secara rutin, memperbarui dan mengintegrasikan sistem informasi akuntansi beserta infrastrukturnya, serta menilai ulang efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, terutama penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan, dan tidak hanya mengandalkan pembinaan komitmen pegawai. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu cakupannya hanya 28 OPD di satu kabupaten sehingga generalisasi terbatas, data bersifat persepsi (*self-report*) sehingga berpotensi bias, dan hanya satu variabel moderasi yang digunakan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan ke beberapa kabupaten/kota, menambahkan variabel seperti kompetensi sumber daya

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14751
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, atau gaya kepemimpinan, mempertimbangkan variabel moderasi atau mediasi lain, serta menggunakan desain longitudinal untuk menangkap perubahan kualitas laporan keuangan dari waktu ke waktu.

Referensi

1. Alpi, M. F., & Akbar, H. (2024). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, *7*(2), 236–250. https://doi.org/10.30596/maneggio.v7i2.22512
2. Ashari, N. W., Dewi, M. W., & Pardanawati, S. L. (2025). Analisis kualitas pelaporan keuangan ditinjau dari sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, *4*(2), 769–778. https://doi.org/10.53088/jikab.v4i2.136
3. Asri, S. R., & Jaeni. (2023). Peran SPI sebagai pemoderasi pada pengaruh teknologi informasi dan SAP terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada BPKAD Kota Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *7*(1), 467–476. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.835
4. Atharrizka, N., Nurjanah, Y., & Andrianto, T. (2021). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Informasi Kesatuan*, *1*(2), 107–118. https://doi.org/10.37641/jikes.v1i2.889
5. Attiogbe, D. A., Arhin, E. Y., & Marfo-Yiadom, E. (2025). Ghana integrated financial management information system and public sector accountability. *Cogent Business & Management*, *12*(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/23311975.2025.2499208
6. Azmi, H. R., & Rahmi, S. (2025). *Pengaruh pengendalian internal, sistem informasi akuntansi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan* [Skripsi, Universitas Bung Hatta].
7. Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh sistem pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 977–989. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.686
8. Bestari, K., & Wahyuni, F. (2023). Determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, *7*(1), 163–184. https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16995
9. BPK RI. (2023). *BPK apresiasi pemda selesaikan laporan keuangan tepat waktu*. https://www.bpk.go.id/news/bpk-apresiasi-pemda-selesaikan-laporan-keuangan-tepat-waktu
10. BPK RI. (2024). *BPK selamatkan keuangan negara sebesar Rp13,66 triliun pada Semester I 2024*. https://www.bpk.go.id/news/bpk-selamatkan-keuangan-negara-sebesar-rp1366-triliun-pada-semester-i-2024
11. BPK Sumbar. (2022). *Pemeriksaan LKPD oleh BPK*. https://sumbar.bpk.go.id/pemeriksaan-lkpd-oleh-bpk/
12. BPK Sumbar. (2024). *Provinsi Sumatera Barat pertahankan opini WTP untuk kedua belas kalinya*. https://sumbar.bpk.go.id/provinsi-sumatera-barat-pertahankan-opini-wtp-untuk-kedua-belas-kalinya/
13. Djumiyati, W., Yunita, K., Muhsin, Karpiana, A. P., & Rusliyawaty. (2024). Standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *4*(1), 1834–1846. https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.6084
14. Ghozali, I. (2021). *Partial least squares: Konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.2.9 untuk penelitian empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
15. Gomes, P., Brusca, I., Fernandes, M. J., & Vilhena, E. (2023). The IPSAS implementation and the use and usefulness of accounting information: A comparative analysis in the Iberian Peninsula. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, *35*(1), 12–40. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-12-2021-0169
16. Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, *31*(1), 2–24. https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203
17. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
18. Kab. Agam. (2026). *Pemerintah Kabupaten Agam*. https://www.agamkab.go.id/
19. Lustrilanang, P., Suwarno, Arif, B., & Subowo, H. (2023). The effect of auditing quality and internal control on financial resilience in public sector organizations: Information quality as the mediating factor. *International Journal of Data and Network Science*, *7*, 1573–1580. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.006
20. Luthfya, A., Rahayu, S., & Friyani, R. (2024). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, *9*(1), 12–25. https://doi.org/10.22437/jaku.v9i1.30533
21. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
22. Metro, A. (2023). *Komitmen kelola keuangan yang efektif, efisien dan transparan, Agam kembali raih opini WTP ke-9*. https://sumbar.bpk.go.id/komitmen-kelola-keuangan-yang-efektif-efisien-dan-transparan-agam-kembali-raih-opini-wtp-ke-9/
23. Ntahondereye, A., Opuodho, G. O., & Muigai, R. G. (2024). Effect of risk assessment as an element of internal control system on the quality of financial reporting information in local governments of Rwanda. *East African Journal of Business and Economics*, *7*(1), 34–46. https://doi.org/10.37284/eajbe.7.1.1764
24. Nulandary, E., & Puspita, E. (2025). Peran komitmen organisasi sebagai moderasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah di pemerintah daerah Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, *2*(4), 57–71. https://doi.org/10.61132/jeap.v2i4.1457
25. Nurliani, I., Jaya, F. P., & Aspiannor, A. (2025). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan melalui kompetensi pegawai. *Pajak dan Manajemen Keuangan*, *2*(3), 54–74. https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i3.1195
26. Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/4566/pp-no-60-tahun-2008
27. Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/4548/pp-no-71-tahun-2010
28. Pradnyandari, G. A. M. G. P., & Putra, C. G. B. (2022). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu*

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14751
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Indonesia, *3*(1), 241–251. https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2302
29. Ramadhan, I., Yahya, I., & Kholis, A. (2022). Analysis of the factors that influence financial reports in government of North Sumatera with implementation of the government's internal control system as moderating variable. *International Journal of Research and Review*, *9*(12), 491–505. https://doi.org/10.52403/ijrr.20221255
30. Redaksi. (2023). *Kejari Agam bongkar korupsi proyek wisata Sajuta Janjang, 3 orang jadi tersangka dan ditahan, kerugian negara mencapai Rp 553 juta*. Posmetro Padang. https://www.posmetropadang.co.id/baca/271179/kejari-agam-bongkar-korupsi-proyek-wisata-sajuta-janjang-3-orang-jadi-tersangka-dan-ditahan-kerugian-negara-mencapai-rp-553-juta/
31. Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Sistem informasi akuntansi* (Edisi 13). Salemba Empat.
32. Rostini, & Nasir, M. (2024). Pengaruh kepuasan kerja, motivasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. *Movere Journal*, *6*(1), 61–69.
33. Sabo, J. G., Ugwudioha, O., & Wayas, J. P. (2024). Effect of adoption of International Public Sector Accounting Standards on quality of financial reports in the public sector in Nigeria. *Journal of Law and Sustainable Development*, *12*(7), 1–28. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i7.3772
34. Sari, & Widiatmoko, J. (2023). Peran komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *7*(2), 826–837. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.955
35. Sidabalok, R. W., Sidabutar, R. C. D., & Tambunan, B. H. (2026). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Bupati Batu Bara. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, *6*(1), 641–662. https://doi.org/10.55606/jumbiku.v6i1.6888
36. Silalahi, E. E., Manu, R. R., & Data, A. (2025). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Journal Economic Education, Business and Accounting*, *4*(1), 335–346.
37. Sugiyono. (2025). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
38. Sunardi, Murwaningsari, E., Martani, D., & Mayangsari, S. (2021). The role of government internal control system quality in moderating the relationship of financial reports quality and local government performance. *Account and Financial Management Journal*, *6*(6), 2364–2371. https://doi.org/10.47191/afmj/v6i6.03
39. Waoma, S., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2024). Regional financial reports quality: Organizational commitment as moderating variable. *International Journal of Social Science Research and Review*, *7*(2), 243–256. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i2.2023
40. Warliana, R., Syafina, L., & Hermain, H. (2023). Pengaruh PSAP dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan Kota Medan. *Jurnal Proaksi*, *10*(3), 366–381. https://doi.org/10.32534/jpk.v10i3.4060

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14751
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)